

**ANALISIS PENGARUH PENDISTRIBUSIAN ZAKAT PRODUKTIF
TERHADAP TINGKAT KESENJANGAN PENDAPATAN DAN
KESEJAHTERAAN MUSTAHIK
Studi Kasus : Mustahik Baznas Kota Yogyakarta**

Mitha Raihana

Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Yogyakarta
Jalan Lingkar Selatan, Tamantirto, Kasihan, Bantul, Yogyakarta
Email : mitharaihana212@gmail.com

Abstract : Zakat merupakan salah satu instrument dalam ekonomi islam untuk mengurangi kesenjangan pendapatan serta meningkatkan kesejahteraan mustahik. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana pengaruh zakat produktif yang didistribusikan oleh Baznas Kota Yogyakarta dalam mengurangi kesenjangan pendapatan serta meningkatkan kesejahteraan mustahik. Teknik pengambilan sampel yang digunakan adalah sampling jenuh, sehingga dapat diperoleh jumlah sample sebanyak 71 orang. Untuk mengetahui tingkat kesenjangan pendapatan, alat analisis yang digunakan adalah Kurva Lorenz, Indeks Gini Ratio, dan kriteria Bank Dunia. Untuk mengetahui tingkat kesejahteraan mustahik, peneliti menggunakan alat analisis berupa indeks kesejahteraan puskas. Hasil penelitian menunjukkan pendistribusian zakat produktif oleh Baznas Kota Yogyakarta dapat mengurangi tingkat kesenjangan pendapatan antar mustahik. Hal ini ditandai dengan peyempitan luas kurva Lorenz, penurunan Indeks Gini Ratio, dan kenaikan proporsi penerimaan pendapatan pada 40% masyarakat berpendapatan terendah. Pendistribusian zakat produktif juga dapat meningkatkan kesejahteraan mustahik.

Kata kunci : Zakat Produktif, Kesenjangan Pendapatan, Indeks Kesejahteraan Puskas, Kesejahteraan.

Abstrak : Zakat is an instrument in Islamic economics to reduce income inequality and improve mustahik welfare. This study aims to find out how the effect of productive zakat is distributed by the Baznas Yogyakarta to reducing income inequality and improving mustahik welfare. The sampling technique used is saturated sampling, so that it can be obtained the number of samples is 71 people. In order to know the level of income inequality, the analytical tool used is the Lorenz Curve, Gini Ratio Index, and World Bank criteria. In order to know the level of mustahik welfare, the writer uses Puskas Welfare Index (IKP). The results showed that the distribution of productive zakat by the Baznas Yogyakarta can reduce income inequality between mustahik. This is characterized by narrowing of the Lorenz curve, a decrease Gini Ratio Index, and an increase proportion of income receipts in the 40% of the lowest income population. The distribution of productive zakat by Baznas Yogyakarta can also improve mustahik welfare.

Keywords : Productive Zakat, Income Inequality, Puskas Welfare Index, Welfare.

PENDAHULUAN

Kesenjangan dalam distribusi pendapatan merupakan salah satu masalah ekonomi yang masih dihadapi oleh Indonesia. Setiap provinsi di Indonesia tidak terlepas dari masalah ketimpangan dalam distribusi pendapatan. Menurut data BPS tahun 2017, Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY) memiliki indeks gini ratio tertinggi yakni sebesar 0,44. Provinsi (DIY) terbagi menjadi 5 wilayah, yaitu 1 kota yaitu Kota Yogyakarta dan 4 kabupaten yang terdiri dari Kabupaten Sleman, Kabupaten Bantul, Kabupaten Gunung Kidul, dan Kabupaten Kulon Progo. Masing – masing dari wilayah tersebut memiliki indeks gini ratio yang berbeda – beda.

Tabel 1. 1
Indeks Gini Ratio di Wilayah DIY

Kabupaten/Kota	Tahun							
	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017
Yogyakarta	0,37	0,35	0,36	0,44	0,42	0,44	0,43	0,45
Sleman	0,37	0,42	0,47	0,39	0,41	0,45	0,40	0,41
Bantul	0,32	0,38	0,41	0,33	0,32	0,38	0,40	0,41
Kulon Progo	0,27	0,39	0,42	0,31	0,38	0,37	0,37	0,39
Gunungkidul	0,27	0,34	0,37	0,27	0,30	0,32	0,33	0,34

Sumber : Susenas BPS, 2018

Dari tabel 1.1 gini ratio wilayah kota Yogyakarta hampir setiap tahunnya meningkat dan termasuk dalam kriteria tingkat ketimpangan sedang atau moderat. Hal ini harus segera diatasi, karena jika dibiarkan berlarut larut dapat menimbulkan kecemburuan sosial. Selain itu kesenjangan yang semakin meningkat akan memiliki dampak buruk bagi pencapaian kesejahteraan masyarakat.

Islam juga memiliki instrumen untuk menambah pendapatan masyarakat miskin, sehingga dapat memberikan kesejahteraan dan memperkecil angka ketimpangan pendapatan, instrumen tersebut adalah zakat. Zakat merupakan suatu kewajiban yang harus ditunaikan oleh umat Islam dengan memberikan sebagian harta yang telah mencapai nisabnya kepada orang – orang yang berhak menerimanya. Dalam zakat terjadi perpindahan harta dari orang yang memiliki harta berkecukupan atau lebih,

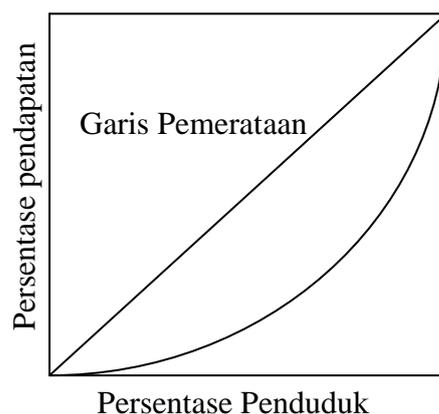
kepada orang yang membutuhkan, sehingga harta tidak menumpuk pada satu atau sekelompok orang saja. Dana zakat memang sangat potensial dalam meningkatkan pendapatan mustahik. Dengan pengelolaan yang baik, dana zakat yang diterima akan mampu meningkatkan produktivitas mustahik, yang selanjutnya mampu meningkatkan pendapatan dan dapat memenuhi kebutuhan pokok mustahik, sehingga kesejahteraan akan tercapai. Bukan hanya itu saja, peningkatan pendapatan mustahik akan mampu mengurangi kesenjangan pendapatan.

Oleh karena itu perlu dilakukan penelitian lebih lanjut untuk mengetahui seberapa besar dana zakat dalam upaya mengurangi kesenjangan pendapatan dan peningkatan kesejahteraan rumah tangga. Dalam hubungan inilah penelitian mengenai Pengaruh Pendistribusian Zakat Produktif terhadap Tingkat Kesenjangan Pendapatan dan Kesejahteraan Mustahik : Studi Kasus Mustahik Baznas Kota Yogyakarta dilakukan.

TINJAUAN PUSTAKA

A. Kesenjangan Pendapatan

Pertumbuhan ekonomi yang tinggi merupakan salah satu indikator yang secara umum digunakan untuk menilai keberhasilan pemerintah dalam melakukan pembangunan. Namun, pertumbuhan ekonomi yang tinggi harus diikuti dengan pemerataan pendapatan, sehingga pembangunan yang telah dilakukan dapat dirasakan oleh semua lapisan masyarakat dan tidak berdampak pada ketimpangan ekonomi yang tinggi. Menurut Todaro dan Smith (2011) terdapat 3 metode untuk mengukur angka ketimpangan. Metode pertama dalam menghitung distribusi pendapatan adalah ukuran distribusi. Metode yang kedua adalah dengan menggunakan kurva Lorenz. Kurva Lorenz menunjukkan hubungan antara kelompok populasi penduduk (sumbu horizontal) dengan dengan kelompok pendapatan (sumbu vertikal), sehingga dari kurva tersebut dapat diketahui berapakah proporsi pendapatan yang dinikmati oleh kelompok populasi tertentu. Di tengah kurva yang memiliki bentuk bujur sangkar ini, terdapat sebuah garis dengan kemiringan 45° yang disebut garis pemerataan.



Sumber : Todaro dan Smith, 2011

Gambar 2. 1
Kurva Lorenz

Metode yang ketiga adalah dengan menghitung Indeks Gini Ratio. Indeks Gini Ratio menunjukkan ukuran kesenjangan di suatu wilayah. Nilai pada Indeks Gini Ratio berkisar antara 0 sampai dengan 1. Semakin mendekati angka 1 semakin besar ketimpangan di wilayah tersebut.

Bank Dunia membagi penyebaran atau distribusi pendapatan menjadi 3 kriteria, yaitu 40% penduduk berpendapatan rendah, 40% penduduk berpendapatan sedang, dan 20% penduduk berpendapatan tinggi. Bank Dunia menetapkan kelompok penduduk dengan 40% berpenghasilan rendah sebagai fokus dalam perhitungan. Semakin besar persentase pendapatan yang dinikmati oleh kelompok penduduk ini, maka semakin merata distribusi pendapatan yang ada di wilayah tersebut (BPS, 2014).

B. Kesejahteraan

Menurut Umer Chapra(2000) tujuan utama syariah adalah kesejahteraan manusia dan penghapusan kesulitan. Pandangan ini dalam lingkup ekonomi memastikan bahwa kesejahteraan ekonomi dapat dicapai dengan pemenuhan kebutuhan pokok manusia, penghapusan kesulitan dan ketidaknyamanan, serta peningkatan kualitas kehidupan baik secara moral maupun material.

Menurut Pusat Kajian Strategi Badan Amil Zakat Nasional, (Baznas, 2017) kesejahteraan dapat diukur dari kondisi material, spiritual, pendidikan, kesehatan, serta kemandirian ekonomi masyarakat.

a. Material

Kesejahteraan dari aspek material dilihat dari total pendapatan. Dari pendapatan yang diterima tersebut akan digunakan untuk memenuhi kebutuhan pokok. Dengan terpenuhinya kebutuhan pokok maka kesejahteraan dapat tercapai.

b. Spiritual

Islam memandang kesejahteraan tidak hanya diukur dari aspek materi, namun juga dari aspek spiritual. Meskipun kadar kualitas keimanan dan ketakwaan seseorang hanya Allah yang tahu, namun terdapat 3 ibadah wajib yang ada di dalam rukun islam, yang mana jika seseorang enggan melaksanakan ketiga ibadah wajib tersebut akan “memiskinkan” kondisi spiritual atau ruhiyah seseorang. 3 ibadah wajib tersebut adalah shalat wajib 5 waktu dalam sehari, puasa wajib di bulan Ramadhan, dan membayar zakat minimal satu kali dalam setahun. Untuk mendukung pelaksanaan ibadah wajib harus mendapat dukungan dari lingkungan keluarga dan kebijakan pemerintah.

c. Kesehatan.

Kesehatan merupakan syarat untuk mendapatkan pendidikan dan pendapatan. Kesehatan akan menentukan kapasitas untuk belajar di sekolah serta menentukan produktivitas dalam bekerja. Kualitas kesehatan menjadi penting dalam menentukan kualitas hidup manusia.

d. Pendidikan

Pendidikan memiliki peranan penting dalam kemajuan dan kesejahteraan individu dan pembangunan suatu bangsa. Negara pun harus menyediakan fasilitas pendidikan yang mudah, murah, serta berkualitas. Hal tersebut akan mempermudah seluruh lapisan masyarakat dalam mengakses pendidikan setinggi – tingginya. Pendidikan tinggi akan meningkatkan kualitas sumber daya manusia

dan mempermudah mendapatkan pekerjaan untuk memperoleh pendapatan, sehingga manusia dapat memenuhi kebutuhan hidupnya.

e. Kemandirian

Kesejahteraan dari aspek kemandirian seseorang dilihat dari apakah ia memiliki pekerjaan atau usaha, serta apakah seseorang memiliki tabungan atau tidak. Pekerjaan atau usaha diperlukan agar seseorang memiliki penghasilan, yang mana penghasilan tersebut akan digunakan untuk memenuhi kebutuhan sehari – hari atau kebutuhan pokoknya. Sedangkan tabungan diperlukan oleh setiap orang sebagai simpanan untuk memenuhi kebutuhan di masa yang akan datang. Seseorang yang memiliki tabungan, biasanya telah memiliki kemampuan untuk memenuhi kebutuhan dasarnya.

C. Zakat

Secara bahasa, zakat berasal dari kata *an-numu wa az-ziyadah* yang berarti tumbuh dan bertambah. Zakat bisa bermakna *Ath – Thaharah* yang berarti suci dan *Al Barakah* yang berarti berkah. Secara istilah yaitu suatu kewajiban yang harus ditunaikan oleh umat islam dengan memberikan sebagian harta yang telah mencapai nisabnya kepada orang – orang yang berhak menerimanya sesuai dengan persyaratan tertentu. Pengertian zakat secara bahasa dan istilah memiliki hubungan yang erat, yaitu zakat adalah orang yang telah mengeluarkan sebagian hartanya yang telah mencapai nisab, jiwanya menjadi lebih suci karena terhindar dari sifat kikir, hartanya secara kuantitas berkurang namun secara kualitas bertambah, hal ini dikarenakan keberkahan yang didapatkan karena telah menunaikan kewajiban rukun islam yang ketiga (Hafidhuddin, 2004)

Allah SWT berfirman dalam Al Quran Surat At – Taubah ayat 60, yang mana pada ayat tersebut dijelaskan terdapat 8 golongan yang berhak menerima zakat, 8 golongan tersebut adalah :

- a. Fakir, adalah orang yang tidak memiliki usaha dan penghasilan tetap dan tidak mampu memenuhi kebutuhan pokoknya.
- b. Miskin, adalah orang yang memiliki pekerjaan dan tidak mampu memenuhi kebutuhan pokoknya.

- c. Amil, adalah orang atau lembaga yang melaksanakan urusan zakat, seperti mengumpulkan, mencatat, dan mendistribusikannya.
- d. Muallaf, menurut Yusuf Al Qaradhawi dalam Rozalinda (2014) muallaf adalah orang diharapkan kecenderungan hatinya atau keyakinannya dapat bertambah terhadap islam.
- e. Riqab, adalah hamba mukatab (hamba yang dijanjikan oleh tuannya akan dimerdekakan apabila hamba tersebut mampu membayar sejumlah uang atau harta) yang tidak memiliki uang untuk membayarnya.
- f. Gharimin, adalah orang yang memiliki hutang ia tidak mampu untuk membayarnya.
- g. Fi sabilillah, adalah orang yang berperang memperjuangkan agama Allah.
- h. Ibnu Sabil, adalah orang yang kehabisan harta atau bekal ketika sedang menempuh perjalanan jauh.

Zakat merupakan perintah Allah yang bersifat wajib. Allah tidak akan memberikan perintah bagi manusia jika perintah tersebut tidak memiliki hikmah atau manfaat bagi manusia. Banyak hikmah yang bisa diambil dari perintah zakat, baik itu dari segi moral, sosial, maupun ekonomi. Dari segi moral, zakat dapat mengikis sifat kikir dan serakah yang ada dalam diri manusia. Selain itu zakat merupakan ungkapan rasa syukur kepada Allah atas rezeki yang telah diberikan. Dalam zakat terkandung unsur pendidikan bahwa manusia harus saling memberi. Memberi sebagian harta yang dimiliki adalah salah satu wujud cinta kasih sayang sesama manusia. Dalam bidang sosial, zakat dapat mempererat tali silaturahmi dan menghilangkan jurang pemisah antara si kaya dan si miskin. Dalam bidang ekonomi, hikmah zakat yang pertama untuk memasyarakatkan etika bisnis yang benar, karena zakat mengeluarkan bagian hak orang lain dari harta kita usahakan dengan baik dan benar. Kedua, zakat dapat mencegah penumpukan harta yang hanya dimiliki atau disimpan oleh segelintir orang. Zakat mampu mengurangi angka pengangguran, hal ini dikarenakan terbukanya lapangan pekerjaan yang dibutuhkan untuk mengelola dana zakat, infaq, dan shodaqoh. Selain itu, sumber dana zakat bisa didistribusikan sebagai tambahan

modal atau usaha bagi fakir miskin sehingga mereka memiliki pekerjaan dan penghasilan serta mampu mencukupi kebutuhan pokoknya. Dengan begitu, zakat mampu mengurangi angka kemiskinan, menciptakan pemerataan pendapatan, dan meningkatkan kesejahteraan mustahik.

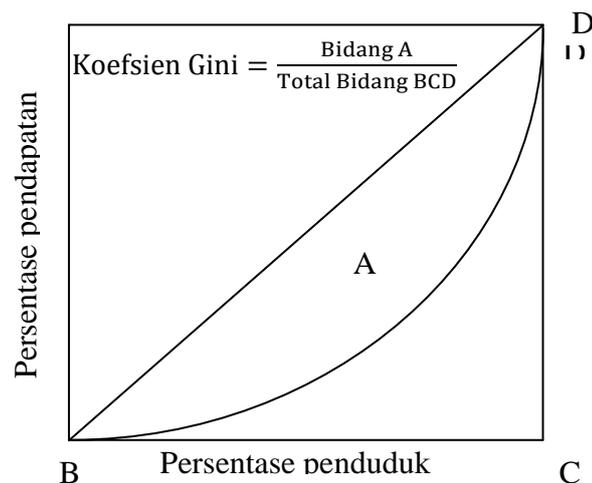
METODOLOGI

a. Kurva Lorenz

Kurva Lorenz terletak pada sebuah garis bujur sangkar, yang mana pada garis tersebut menghubungkan kelompok populasi (sumbu horizontal) dan kelompok pendapatan (sumbu vertikal), sehingga dari kurva tersebut dapat diketahui berapakah proporsi pendapatan yang dinikmati oleh kelompok populasi tertentu. Di tengah kurva yang memiliki bentuk bujur sangkar ini, terdapat sebuah garis dengan kemiringan 45° . Semakin kurva Lorenz menjauhi garis pemerataan, maka distribusi pendapatan di wilayah tersebut semakin timpang, begitu juga sebaliknya

b. Indeks Gini Ratio

Perhitungan gini ratio berasal dari pengukuran luas suatu kurva yang bernama kurva Lorenz. Secara ilustrasi luas kurva Lorenz dapat diperoleh dengan cara menghitung rasio dari bidang yang berada diantara bidang diagonal dan kurva Lorenz, kemudian dibagi dengan total bidang setengah bujur sangkar tempat kurva tersebut terletak pada gambar 3.2



Sumber : Todaro dan Smith, 2011

Gambar 3. 1
Perhitungan Luas Kurva Lorenz untuk Memperoleh Gini Ratio

Nilai pada indeks gini ratio berkisar antara 0 sampai dengan 1. Semakin mendekati angka 1 semakin besar ketimpangan di wilayah tersebut. Menurut Oshima, nilai gini ratio dibagi menjadi 3 golongan, yaitu golongan rendah, moderat, dan tinggi. Nilai gini ratio 0,3 dikategorikan ketimpangan rendah, nilai gini ratio 0,3 – 0,5 dikategorikan ketimpangan moderat, dan nilai gini ratio <0,5 dikategorikan ketimpangan yang tinggi.

c. Kriteria Bank Dunia

Menurut kriteria Bank Dunia tingkat kesenjangan pendapatan dapat diketahui dengan mengukur berapa bagiankah pendapatan yang dinikmati oleh 40% penduduk berpenghasilan rendah.

d. Indeks Puskas Baznas (IKP)

Indeks Kesejahteraan Puskas atau IKP merupakan alat ukur yang disusun oleh Tim Peneliti Pusat Kajian Strategis Badan Amil Zakat Nasional (Pukas Baznas) untuk mengukur dampak pendayagunaan zakat terhadap kesejahteraan mustahik. IKP memiliki 3 komponen dalam perhitungannya, yaitu indeks kesejahteraan CIBEST, indeks modifikasi Indeks Pembangunan Manusia (IPM), dan indeks kemandirian.

1) Indeks Kesejahteraan CIBEST

Indeks CIBEST merupakan indeks kemiskinan islami, yang mana dalam indeks tersebut dibagi menjadi 4 indeks atau kuadran, yaitu indeks kesejahteraan, indeks kemiskinan spiritual, indeks kemiskinan materiil, dan indeks kemiskinan absolut.

Dalam mengkategorikan status suatu keluarga atau rumah tangga pada kuadran CIBEST, diperlukan standar nilai apakah keluarga tersebut mampu mencukupi kebutuhan secara material atau spiritual. Suatu keluarga dikatakan mampu memenuhi kebutuhan material apabila pendapatan keluarga tersebut diatas MV (*material value*). Sedangkan pemenuhan kebutuhan spiritual dihitung berdasarkan standar pemenuhan 5 variabel, antara lain skor pelaksanaan ibadah shalat, puasa, zakat, lingkungan keluarga, dan kebijakan pemerintah. Dalam

perhitungan IKP, indeks CIBEST yang diperlukan hanya besaran indeks kesejahteraan, formula indeks kesejahteraan adalah sebagai berikut:

$$W = \frac{w}{N}$$

Dimana:

W = Indeks kesejahteraan; $0 \leq W \leq 1$

w = Jumlah keluarga sejahtera atau berada di kuadran 1

N = Jumlah keluarga yang diobservasi

2) Indeks Modifikasi IPM

IPM digunakan untuk mengukur kualitas hidup manusia dari segi kesehatan, pendidikan, dan pengeluaran. Namun, komponen IPM yang diperlukan untuk perhitungan IKP hanya dari segi kesehatan dan pendidikan. Hal ini dikarenakan komponen pendapatan dan daya beli sudah termasuk dalam perhitungan CIBEST. Oleh karena itu perhitungan IPM dalam IKP disebut modifikasi IPM atau *Modified HDI*. Salah satu kajian terkait *Modified HDI* tersebut pernah dilakukan oleh Nurzaman (2010) dengan istilah disagregasi IPM.

(a) Indeks Kesehatan

Indeks harapan hidup yang saat ini digunakan oleh UNDP dan beberapa negara dalam mengestimasi IPM ditingkat nasional adalah dengan menganggap kondisi ketika individu lahir. Demikian juga untuk tingkat provinsi dan kabupaten, telah sesuai dengan standar nilai IPM internasional. Namun dalam penelitian ini, untuk memperkirakan nilai indeks harapan hidup pada tingkat individu akan dilakukan penyesuaian metode dengan mempertimbangkan variabilitas dari populasi. Tahap pertama dalam perhitungan indeks kesehatan adalah menestimasi harapan hidup di tingkat keluarga yang disesuaikan dengan variabel jumlah pendapatan dan usia melalui metode imputasi. Spesifikasi model adalah sebagai berikut

$$Ex_{a,g} = \alpha_0 + \alpha_1 (\ln \text{income } f) + \alpha_2 (\text{gender} + \alpha_4 (\text{age}) + \alpha_5 (\text{age})^2) + u$$

Di mana $Ex_{a,g}$, adalah usia harapan hidup berdasarkan usia (a), jenis kelamin (g) berdasarkan data sekunder yang tersedia. Karena data statistik yang terbatas di Indonesia, nilai harapan hidup berdasarkan usia akan diambil dari *Wealth Health Organization (WHO)*. Kemudian, pendapatan adalah pendapatan per kapita untuk setiap keluarga dan gen adalah variabel dummy untuk jenis kelamin. Tahap kedua adalah mempertimbangkan harapan hidup individu (i) yang telah disesuaikan. Indeks harapan hidup individu dihitung sebagai berikut:

$$IH_i = \frac{(Ex_{a,g}(i) - Ex_{a,g}(\min))}{Ex_{a,g}(\max) - Ex_{a,g}(\min)}$$

Di mana IHi adalah indeks harapan hidup untuk individu (i); $Ex_{a,g}(i)$ adalah harapan hidup individu (i) yang disesuaikan dengan usia, dan jenis kelamin; Kemudian $Ex_{a,g}(\max)$ dan $Ex_{a,g}(\min)$ adalah data standar internasional untuk harapan hidup maksimum dan minimum yang diambil dari WHO dengan mempertimbangkan distribusi di antara negara-negara. Tahap terakhir adalah, hitung indeks harapan hidup untuk rumah tangga "h" yang diperoleh dari indeks rata-rata untuk seluruh keluarga.

$$IH_h = \sum (IHi/n)$$

Di mana n adalah jumlah anggota rumah tangga di rumah tangga "h".

(b) Indeks Pendidikan

Indeks pendidikan menggunakan dua indikator yaitu rata-rata lama sekolah dan tingkat melek huruf. Rata-rata lama sekolah merupakan rata-rata jumlah tahun yang telah dihabiskan oleh penduduk usia 15 tahun ke atas pada jenjang pendidikan formal yang dijalani. Dengan kata lain, indikator ini dihitung berdasarkan tingkat/kelas yang sedang/pernah dijalani dan jenjang pendidikan yang ditamatkan. Angka melek huruf juga diperlakukan untuk penduduk usia 15 tahun atau lebih dengan indikator yang diperoleh dari kemampuan membaca dan menulis. Untuk indikator melek huruf, 100 menggambarkan kondisi masyarakat yang mampu membaca dan menulis dan kondisi 0 untuk sebaliknya. umus untuk menghitung indeks pendidikan adalah sebagai berikut :

$$\text{Indeks Pendidikan} = \{2/3 [(Lit - 0)/(100 - 0)] + 1/3 [LS - 0] / (15 - 0)\} \times 100$$

Keterangan:

Lit = angka melek huruf

LS = lama sekolah

0 = jumlah minimum Lit dan LS

100 = jumlah maksimum dari Lit

15 = jumlah minimum dari LS

Dengan demikian, Modifikasi IPM dapat dirumuskan sebagai berikut

$$\text{Indeks Modifikasi IPM} = 1/2 (\text{Indeks Kesehatan}) + 1/2(\text{Indeks Pendidikan})$$

3) Indeks Kemandirian

Perhitungan selanjutnya adalah kemandirian mustahik. Perhitungan kemandirian ini dilihat dari apakah mustahik memiliki pekerjaan tetap atau usaha, serta apakah mustahik memiliki tabungan. Penilaian kemandirian berupa *likertscale* dengan skor 1-5. *Likertscale* pada variabel kemandirian meliputi

Tabel 3. 1
Indeks Kemandirian

Kriteria				
(1= sangat lemah, 2= lemah, 3= cukup, 4= kuat, 5= sangat kuat)				
1	2	3	4	5
Tidak memiliki pekerjaan dan usaha/bisnis	Memiliki pekerjaan tidak tetap (serabutan)	Hanya memiliki salah satu dari pekerjaan tetap atau usaha/bisnis	Memiliki salah satu dari pekerjaan tetap atau usaha/bisnis dan memiliki tabungan	Memiliki pekerjaan tetap, usaha/bisnis dan tabungan

Sumber : Puskas Baznas

Indeks kemandirian tersebut memberikan formulapenghitungan pada setiap variabelnya dengan menggunakan rumusan sebagai berikut

$$I_i = \frac{(S_i - S_{min})}{S_{max} - S_{min}}$$

Dimana,

- I_i = Indeks pada variabel i
- S_i = nilai skor aktual pada pengukuran variabel i
- S_{max} = Skor maksimal
- S_{min} = Skor minimal

Langkah terakhir adalah mengkuantifikasikan ketiga variabel, sehingga rumus perhitungan IKP adalah

$$D = (X_{221}) \times 0,40 + (X_{222}) \times 0,40 + (X_{223}) \times 0,20$$

Dimana:

- (X_{221}) = Indeks Kesejahteraan CIBEST (nilai kesejahteraan material dan spiritual)
- (X_{222}) = Indeks Modifikasi IPM (pendidikan dan kesehatan)
- (X_{223}) = Nilai Kemandirian

Dari penilaian tersebut maka akan dihasilkan nilai dari 0 – 1, dimana nilai 0 mempresentasikan kondisi rumah tangga yang tidak sejahtera, sementara nilai 1 sebagai kondisi rumah tangga yang sudah sejahtera. Klasifikasi ranking dari penilaian tersebut dapat diprotret pada tabel serikut:

Tabel 3. 2
Kategori Penilaian Indeks Kesejahteraan Puskas (IKP)

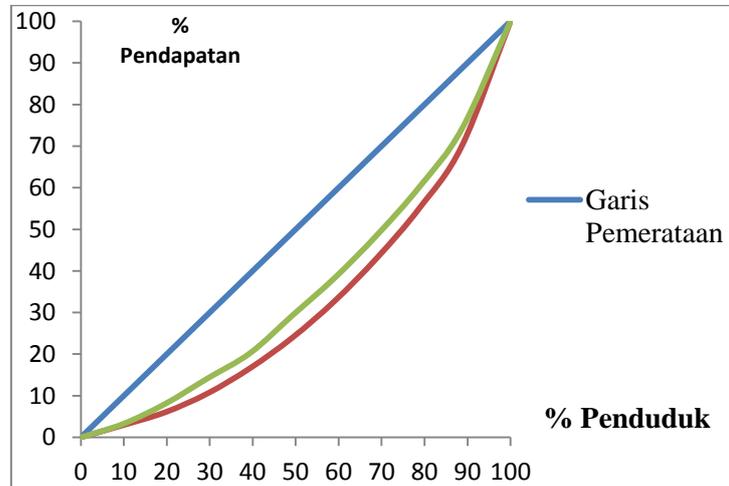
Score Range	Keterangan
0,00 – 0,20	Tidak baik
0,21 – 0,40	Kurang baik
0,41 – 0,60	Cukup baik
0,61 – 0,80	Baik
0,81 – 1,00	Sangat baik

Sumber : Puskas Baznas

HASIL PENELITIAN

A. Dampak Pendistribusian Zakat terhadap Tingkat Kesenjangan Pendapatan

1. Kurva Lorenz



Sumber : Hasil olah data *Microsoft Excel*

Gambar 4. 1

Kurva Lorenz Sebelum dan Sesudah Pendistribusian Zakat Produktif oleh Baznas Kota Yogyakarta

Pada gambar 4.1 terdapat 2 kurva Lorenz yang dibatasi oleh garis pemerataan berwarna biru. Pertama, kurva Lorenz berwarna merah yang merupakan kurva Lorenz sebelum adanya pendistribusian zakat, atau dengan kata lain mustahik belum menerima bantuan zakat produktif. Sedangkan kurva Lorenz kedua yang berwarna hijau merupakan kurva Lorenz setelah adanya pendistribusian zakat, dengan kata lain mustahik telah menerima bantuan zakat produktif. Kurva ini menunjukkan bahwa zakat mampu mengurangi kesenjangan dalam distribusi pendapatan. Hal ini ditandai dengan semakin mendekatnya kurva Lorenz berwarna hijau pada garis pemerataan.

2. Indeks Gini Ratio

Berdasarkan perhitungan dari kurva Lorenz, terdapat perubahan tingkat kesenjangan pendapatan sebelum dan sesudah pendistribusian zakat. Koefisien gini yang semula berada pada angka 0,37 turun menjadi 0,30.

3. Kriteria Bank Dunia

Metode perhitungan menurut kriteria Bank Dunia, kesenjangan pendapatan antar mustahik tergolong dalam kategori ketimpangan moderat, karena sebanyak 40% penduduk berpendapatan rendah menerima atau menikmati 16,65 % dari total pendapatan. Setelah adanya pendistribusian zakat produktif oleh Baznas Kota Yogyakarta, sebanyak 40% penduduk berpendapatan rendah menerima atau menikmati 21,36 % dari total pendapatan, sehingga tingkat ketimpangannya tergolong tingkat ketimpangan rendah.

B. Dampak Pendistribusian Zakat terhadap Tingkat Kesejahteraan Mustahik

Tingkat kesejahteraan mustahik sebelum dan sesudah pendistribusian zakat dapat diketahui melalui perhitungan Indeks Kesejahteraan Puskas (IKP). Dalam perhitungan IKP, terdapat 5 aspek yang menjadi perhitungan untuk mengukur kesejahteraan. Kelima aspek tersebut antara lain aspek material dan spiritual yang dihitung dengan Model CIBEST, aspek kesehatan dan pendidikan yang dihitung dengan menggunakan Indeks Modifikasi IPM, dan aspek kemandirian yang dihitung melalui skala likert.

1. Dampak Zakat berdasarkan Model CIBEST

Tabel 4. 1

Nilai Indeks Kesejahteraan CIBEST Sebelum dan Sesudah Pendistribusian Zakat Produktif oleh Baznas Kota Yogyakarta

Waktu	Nilai Indeks Kesejahteraan Cibest(Kuadran 1)	Keterangan
Sebelum zakat	0,41	Kurang baik
Sesudah zakat	0,73	Baik

Sumber : Hasil olah data *Microsoft Excel*

Indeks kesejahteraan CIBEST sebelum adanya pendistribusian zakat sebesar 0,41 dengan kategori kurang baik. Setelah adanya pendistribusian zakat nilai indeks kesejahteraan CIBEST naik menjadi 0,73. Nilai tersebut berada pada kategori baik. Peningkatan jumlah rumah tangga mustahik pada kuadran 1 dikarenakan adanya peningkatan jumlah pendapatan yang diterima dari bantuan zakat produktif berupa modal usaha, serta pendampingan spiritual yang secara

rutin diberikan oleh Baznas Kota Yogyakarta kepada mustahik penerima bantuan zakat produktif.

2. Dampak Zakat berdasarkan Modifikasi IPM.

Perhitungan selanjutnya dilihat dari aspek kesehatan dan pendidikan yang dihitung dalam indeks modifikasi IPM.

Tabel 4. 2
Indeks Modifikasi IPM Sebelum dan Sesudah Pendistribusian Zakat Produktif oleh Baznas Kota Yogyakarta

Komponen IPM	Nilai Sebelum zakat	Nilai sesudah Zakat	Keterangan
Indeks Kesehatan	0,61	0,61	Cukup baik
Indeks Pendidikan	0,89	0,89	Sangat Baik
Modifikasi IPM	0,75	0,75	Baik

Sumber : Hasil olah data *Microsoft Excel*

Tabel 4.10 menunjukkan bahwa nilai indeks modifikasi IPM sebelum maupun sesudah pendistribusian zakat produktif, memiliki nilai 0,75 dengan nilai indeks kesehatan sebesar 0,61 dan nilai indeks pendidikan sebesar 0,89.

3. Dampak Zakat terhadap Kemandirian

Kemandirian bagi para mustahik merupakan tujuan dari pemberian zakat produktif. Pendistribusian zakat produktif dapat berpengaruh dalam peningkatan kapasitas ekonomi mustahik yang berkesinambungan.

Tabel 4. 3
Indeks Kemandirian Sebelum dan Sesudah Pendistribusian Zakat Produktif oleh Baznas Kota Yogyakarta

Waktu	Nilai Kemandirian	Keterangan
Sebelum zakat	0,50	Cukup baik
Sesudah zakat	0,75	Baik

Sumber : Hasil olah data *Microsoft Excel*

Tabel 4.11 menunjukkan bahwa indeks kemandirian sebelum adanya pendistribusian zakat memiliki nilai 0,50. Nilai tersebut masuk dalam kategori

cukup baik. Setelah adanya pendistribusian zakat produktif indeks kemandirian naik menjadi 0,75. Nilai tersebut masuk dalam kategori cukup baik.

C. Tingkat Kesejahteraan Mustahik

Langkah terakhir dalam perhitungan tingkat kesejahteraan mustahik dengan menggunakan Indeks Kesejahteraan Puskas adalah mengkuantifikasikan ketiga variabel menjadi satu. Sehingga Indeks Kesejahteraan Puskas (IKP) sebelum pendistribusian zakat produktif oleh Baznas Kota Yogyakarta adalah

$$\begin{aligned} \text{IKP} &= a(0,40) + b(0,40) + c(0,20) \\ &= 0,41(0,40) + 0,75(0,40) + 0,50(0,20) \\ &= 0,16 + 0,30 + 0,1 \\ &= 0,56 \end{aligned}$$

Dan Indeks Kesejahteraan Puskas (IKP) sesudah pendistribusian zakat produktif oleh Baznas Kota Yogyakarta adalah

$$\begin{aligned} \text{IKP} &= a(0,40) + b(0,40) + c(0,20) \\ &= 0,73(0,40) + 0,75(0,40) + 0,75(0,20) \\ &= 0,29 + 0,30 + 0,15 \\ &= 0,74 \end{aligned}$$

Tabel 4. 4
Indeks Kesejahteraan Puskas (IKP) Sebelum dan Sesudah Pendistribusian Zakat Produktif oleh Baznas Kota Yogyakarta

Variabel	Indeks Kesejahteraan CIBEST	Indeks Modifikasi IPM	Indeks Kemandirian	Indeks Kesejahteraan Puskas (IKP)	Kriteria
Sebelum zakat	0,41	0,75	0,50	0,56	Cukup Baik
Sesudah zakat	0,73	0,75	0,75	0,74	Baik

Sumber : Hasil olah data *Microsoft Excel*

PEMBAHASAN

1. Zakat dan Kesenjangan Pendapatan

Kesenjangan pendapatan merupakan salah masalah ekonomiyang tidak bisa dihindari oleh seluruh negara di dunia dan menjadi pekerjaan rumah yang tak ringan bagi pemerintah. Jika suatu negara memiliki masalah ekonomi pada tingkat kesenjangan pendapatan yang tinggi, masalah tersebut tidak bisa dibiarkan berlarut larut, karena dapat menimbulkan konflik dan kecemburuan sosial, sehingga diperlukan langkah konkrit untuk menyelesaikannya.

Penelitian yang dilakukan oleh Tiara Tsani (2008) di 2 kecamatan Provinsi Lampung mengungkapkan bahwa pendistribusian zakat dapat meningkatkan jumlah pendapatan yang pada akhirnya mengurangi tingkat kesenjangan pendapatan. Dalam penelitiannya, tingkat kesenjangan pendapatan diukur dari indeks gini ratio dan rasio kuznets. Menurunnya tingkat kesenjangan pendapatan ditandai dengan menurunnya indeks gini pada angka 0,638 menjadi 0,625, dan rasio Kuznets yang semula 16,7 menjadi 14,4.

Penelitian ini melihat bagaimana pengaruh pendistribusian zakat produktif oleh Baznas Kota Yogyakarta dalam mengurangi tingkat kesenjangan pendapatan dengan menggunakan perhitungan kurva Lorenz, Indeks Gini Ratio, dan perhitungan menurut kriteria bank dunia. Hasil pengukuran dengan menggunakan kurva Lorenz menunjukkan bahwa luas daerah kurva Lorenz sesudah pendistribusian zakat semakin menyempit bila dibandingkan sebelum pendistribusian zakat ,atau dengan kata lain kurva Lorenz setelah pendistribusian zakat bergerak mendekati garis pemerataan. Hasil perhitungan indeks gini ratio menunjukkan nilai Gini Ratio mengalami penurunan yang semula berada pada 0,37menjadi 0,30. Dari perhitungan menurut kriteria bank dunia, proporsi penerimaan pendapatan pada 40% masyarakat berpendapatan terendah meningkat dari 16,65% menjadi 21,36%. Luas kurva Lorenz yang semakin menyempit setelah pendistribusian zakat, penurunan Indeks Gini Ratio, dan kenaikan proporsi penerimaan pendapatan pada 40% masyarakat berpendapatan terendah menunjukkan bahwa pendistribusian zakat produktif oleh Baznas Kota Yogyakarta mampu mengurangi tingkat kesenjangan pendapatan

antarkelompok masyarakat. Pemberian bantuan zakat produktif berupa modal usaha bertujuan untuk meningkatkan kapasitas ekonomi mustahik. Pemberian zakat produktif tersebut dapat meningkatkan jumlah pendapatan yang pada akhirnya dapat mempersempit kesenjangan pendapatan. Hal ini sesuai dengan falsafah ekonomi islam yang menuntut adanya sistem distribusi pendapatan dan kekayaan yang merata, sehingga keadilan sosioekonomi dapat dirasakan oleh seluruh lapisan masyarakat.

2. Zakat dan Kesejahteraan

Salah satu tujuan dari pendistribusian zakat adalah bagaimana zakat mampu memberikan kesejahteraan bagi mustahik. Menurut Umer Chapra (2000) kesejahteraan ekonomi dapat dicapai dengan pemenuhan kebutuhan pokok manusia, penghapusan kesulitan dan ketidaknyamanan, serta peningkatan kualitas kehidupan baik secara moral maupun material.

Menurut penelitian yang dilakukan oleh Irfan Syauqi Beik dan Caesar Pratama (2015) di Kabupaten Bogor melalui perhitungan model CIBEST, pendistribusian zakat mampu meningkatkan jumlah pendapatan rumah tangga mustahik. Selain itu melalui bimbingan – bimbingan oleh lembaga zakat yang bersifat spiritual, mampu meningkatkan ibadah mustahik. Dengan begitu, pendistribusian zakat mampu meningkatkan kesejahteraan mustahik baik secara material maupun secara spiritual.

Penelitian ini dapat memberikan gambaran bahwa pendistribusian zakat produktif oleh Baznas Kota Yogyakarta dapat meningkatkan kesejahteraan mustahik. Peningkatan jumlah rumah tangga mustahik pada kuadran 1 dikarenakan adanya peningkatan jumlah pendapatan yang diterima dari bantuan zakat produktif berupa modal usaha, serta pendampingan spiritual yang secara rutin diberikan oleh Baznas Kota Yogyakarta kepada mustahik penerima bantuan zakat produktif.

Secara material pendistribusian zakat produktif mampu meningkatkan pendapatan mustahik. Setelah diakumulasi kenaikan pendapatan para mustahik sebesar 35,07%. Adanya kenaikan pendapatan dikarenakan penyaluran bantuan zakat produktif berupa modal usaha yang dimanfaatkan secara optimal, serta pendampingan yang dilakukan oleh pihak Baznas Kota Yogyakarta. Secara spiritual,

kondisi spiritual mustahik mengalami kenaikan dengan rata – rata nilai spiritual yang semula 4 menjadi 4.2. Kenaikan kondisi atau nilai spiritual yang tidak terlalu signifikan dikarenakan kurang adanya kesadaran dari mustahik untuk lebih mendekatkan diri dengan Allah, Selain itu para mustahik menanggapi bahwa urusan ibadah bergantung pada kepribadian masing – masing. Setelah perhitungan dari aspek material dan spiritual, maka dapat dihitung indeks CIBEST secara keseluruhan. Menurut perhitungan dengan model CIBEST, jumlah keluarga sejahtera di kuadran 1 yang semula mengalami kenaikan yang semula berjumlah 29 rumah tangga dengan nilai indeks 0,41 menjadi 52 rumah tangga dengan nilai indeks 0,73. Rumah tangga yang berada pada kuadran 2 atau dalam kategori kemiskinan material, sebelum adanya pendistribusian zakat produktif sebanyak 42 rumah tangga dengan nilai 0,59. Setelah adanya pendistribusian zakat produktif jumlahnya turun menjadi 19 rumah tangga dengan nilai indeks 0,27. Sedangkan pada kuadran 3 dan kuadran 4, tidak ada rumah tangga yang masuk dalam kategori tersebut. Dengan demikian pendistribusian zakat produktif dapat meningkatkan kesejahteraan material dan spiritual mustahik.

Dilihat dari aspek kesehatan dan pendidikan yang diukur menggunakan indeks modifikasi IPM, nilai indeks modifikasi IPM sebelum maupun sesudah pendistribusian zakat produktif memiliki nilai 0,75. Indeks kesehatan memiliki nilai sebesar 0,61 dengan kategori cukup baik dan nilai indeks pendidikan sebesar 0,89 dengan kategori baik. Indeks modifikasi IPM tidak menunjukkan kenaikan atau penurunan sebelum dan sesudah pendistribusian zakat. Hal ini dikarenakan indeks kesehatan tidak memiliki hubungan secara langsung dengan dampak distribusi zakat. Hal ini sejalan dengan penelitian Murniati dan Beik (2013) tentang pengaruh zakat terhadap IPM mustahik di Baznas Kota Bogor. Hasil penelitian menunjukkan bahwa indeks angka harapan hidup dan indeks pendidikan bukan komponen yang memiliki hubungan secara langsung dengan distribusi zakat. Komponen IPM yang memiliki hubungan secara langsung dengan distribusi zakat adalah indeks paritas daya beli. Hal ini dikarenakan dana zakat yang disalurkan lebih kepada bantuan uang dan sembako. Pada penelitian ini, indeks paritas daya beli tidak dimasukkan dalam perhitungan modifikasi IPM. Hal ini dikarenakan akan terjadi *double counting* dengan indeks kesejahteraan CIBEST. Oleh karena itu, perhitungan modifikasi IPM

hanya memasukkan dua indeks yaitu indeks kesehatan dan indeks pendidikan. Nilai modifikasi IPM tergolong baik karena dalam mengakses kesehatan dan pendidikan, para mustahik menggunakan fasilitas yang telah diberikan oleh pemerintah seperti Kartu Indonesia Sehat (KIS) dan Kartu Menuju Sehat (KMS).

Sedangkan dari aspek kemandirian yang dihitung dari indeks kemandirian, menunjukkan sebelum adanya pendistribusian zakat memiliki nilai 0,50 dengan kategori nilai cukup baik. Setelah pendistribusian zakat produktif naik menjadi 0,75 dengan kategori nilai cukup baik. Sebelum pendistribusian zakat produktif, rumah tangga yang berada di skor 2 (jenis pekerjaan serabutan) berjumlah 30 rumah tangga. Rumah tangga *mustahik* yang mendapat skor 3 (memiliki pekerjaan tetapi tidak memiliki tabungan) berjumlah 28 rumah tangga. Serta rumah tangga *mustahik* yang mendapat skor 4 (memiliki pekerjaan dan tabungan) berjumlah 13 rumah tangga. Setelah pendistribusian zakat produktif, Rumah tangga *mustahik* yang mendapat skor 4 (memiliki pekerjaan dan tabungan) sebanyak 57 rumah tangga. Sedangkan *mustahik* yang mendapat skor 5 (memiliki pekerjaan, usaha dan tabungan) sebanyak 14 rumah tangga. Indeks kemandirian meningkat karena para mustahik mampu memiliki usaha sendiri. Dari usaha tersebut mereka mampu meningkatkan jumlah pendapatan yang diterima. Selain itu para mustahik mampu menyisihkan sebagian pendapatan mereka untuk ditabung di Bank Syariah.

Kesejahteraan dihitung dari aspek material dan spiritual yang diukur dengan indeks kesejahteraan CIBEST, aspek kesehatan dan pendidikan yang diukur dengan indeks modifikasi IPM, dan aspek kemandirian yang diukur kriteria indeks kemandirian, selanjutnya diakumulasi sehingga menghasilkan Indeks Kesejahteraan Puskas (IKP). Nilai IKP sebelum pendistribusian zakat produktif sebesar 0,51 dengan kriteria cukup baik. Naiknya Indeks Kesejahteraan Puskas (IKP) menunjukkan meningkatnya kesejahteraan mustahik pasca memperoleh bantuan zakat produktif berupa modal usaha. Modal usaha yang diberikan oleh Baznas Kota Yogyakarta menjadi lebih produktif, sehingga dapat menghasilkan keuntungan dan mampu meningkatkan pendapatan mustahik. Dengan meningkatnya jumlah pendapatan yang diterima, para mustahik dapat memenuhi kebutuhan pokoknya dan mampu membuat mustahik menjadi lebih mandiri. Selain peningkatan dalam aspek

material, pendistribusian zakat produktif juga mampu meningkatkan kondisi spiritual mustahik. Hal ini dikarenakan adanya bimbingan spiritual yang diberikan oleh pihak Baznas Kota Yogyakarta. Dengan meningkatnya kondisi material dan spiritual mustahik, tujuan akhir dari pendistribusian zakat produktif yaitu memberikan dan meningkatkan kesejahteraan bagi para mustahiknya dapat tercapai.

KESIMPULAN

Berdasarkan uraian yang telah dijelaskan sebelumnya, maka kesimpulan yang dapat peneliti ambil dari penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Pendistribusian zakat produktif oleh Baznas Kota Yogyakarta dapat mengurangi tingkat kesenjangan antar mustahik. Hal ini ditandai dengan luas kurva Lorenz yang semakin menyempit atau dengan kata lain kurva Lorenz setelah pendistribusian zakat semakin mendekati garis pemerataan. Selain itu, indeks gini ratio yang semula berada pada 0,37 mengalami penurunan pada angka 0,30. Serta proporsi penerimaan pendapatan pada 40% masyarakat berpendapatan terendah meningkat dari 16,65% menjadi 21,36%.
2. Dalam perhitungan CIBEST, jumlah rumah tangga mustahik yang tergolong sejahtera semula 29 rumah tanggadengan nilai indeks kesejahteraan 0,41, setelah pendistribusian zakat produktif jumlahnya meningkat menjadi 52 rumah tangga dengan nilai indeks kesejahteraan 0,73. Indeks modifikasi IPM sebelum dan sesudah zakat sebesar 0,75. Sedangkan nilai indeks kemandirian semula 0,50 dan sesudah zakat 0,75. Dengan demikian, nilai IKP sebelum pendistribusian zakat 0,56 dan sesudah pendistribusian zakat 0,74. Sehingga, pendistribusian zakat produktif oleh Baznas Kota Yogyakarta mampu meningkatkan kesejahteraan mustahik.

SARAN

1. Bagi Badan Amil Zakat

Berdasarkan hasil penelitian, pendistribusian zakat produktif mampu mengurangi kesenjangan pendapatan dan meningkatkan kesejahteraan mustahik. Dengan demikian diharapkan badan amil zakat mampu menambah jumlah penerima manfaat.

2. Bagi Masyarakat

Bagi muzaki dan masyarakat umum, diharapkan masyarakat muslim untuk menunaikan zakat dengan membayarkannya melalui Baznas Kota Yogyakarta, agar bisa dikelola dan didistribusikan kepada yang berhak menerimanya sesuai dengan kebutuhan mustahik.

Bagi mustahik, diharapkan mampu mengatur dana bantuan usaha yang diberikan agar usaha yang dijalankan bisa lebih berkembang. Sehingga status mustahik bias berubah menjadi muzaki.

DAFTAR PUSTAKA.

- Afifah, A. (2016). "Pengaruh Dana Zakat terhadap kesejahteraan Rumah Tangga Miskin Muslim di Kabupaten Subang". *Skripsi*, 15 - 48.
- Ayuniyyah, Q., Pramanik, A. H., Saad, N. M., & Ariffin, M. I. (2017). "The Comparison between Consumption and Production-based Zakat Distribution Programs for Poverty Alleviation and Income Inequality Reduction". *International Journal of Zakat Vol.2 (2)*, 11-28.
- Basuki, A. T. (2015). *Regresi dalam Penelitian Ekonomi dan Bisnis*. Yogyakarta: Danisa Media.
- Beik, I. S., & Arsyanti, L. D. (2016). *Ekonomi Pembangunan Syariah*. Jakarta: RajaGrafindo Persada.
- Beik, I. S., & Pratama, C. (2015). "Analisis Pengaruh Zakat pada Kesejahteraan Mustahik Model CIBEST". *Jurnal Ekonomi Islam Republika*, 23.
- BPS. (2014). *Kota Yogyakarta dalam Angka 2014*. Yogyakarta: BPS.
- Chapra, U. (2000). *Sistem Moneter Islam*. Jakarta: Gema Insani.
- Chaundry, M. S. (2012). *Sistem Ekonomi Islam : Prinsip Dasar*. Jakarta: Prenamedia Grup.

- Darsono, S. N., & Donkwa, M. (2016). "Factor Analysis of Household Poverty in Rural Area of West Kalimantan, Indonesia". *Advances in Management & Applied Economics*, vol.6, 15-28.
- Farchatunnisa, H. (2017). "Analisis Kinerja Baznas Kota Bandung dengan Pendekatan Indeks Zakat Nasional (IZN)". *Skripsi* , 15-34.
- Fatullah, H. L. (2015). "Pengaruh Bantuan Zakat Produktif oleh Lembaga Amil Zakat terhadap Pendapatan Mustahik (Studi Kasus LAZIS Sabilillah dan LAZA Zawa Malang)".
- Fathurrahman, A. (2012). "Kebijakan Fiskal di Indonesia dalam Perspektif Ekonomi Islam : Studi Kasus Mengentaskan Kemiskinan". *Jurnal Ekonomi dan Studi pembangunan Volume 13, Nomor 1*, 72-82.
- Fitriani. (2017). "Analisis Kinerja Baznas Kabupaten Pati dengan Pendekatan Indeks Zakat Nasional (IZN)". *Skripsi* , 11-30.
- FORDEBI. (2016). *Ekonomi dan Bisnis Islam Seri Konsep dan Aplikasi Ekonomi dan Bisnis Islam* . Jakarta: RajaGrafindo Persada.
- Hafidhuddin, D. (2004). *Zakat dalam Perekonomian Modern*. Depok: Gema Insani.
- Ibrahim, S. M. (2015). "The Role of Zakat in Establishing Social Welfare and Economic Sustainability". *International Journal of Management and Commerce Innovations* , 437-441.
- Ikram, A. D. (2016). "Peran Zakat Terhadap Produktivitas Mustahik (Studi Kasus Pendayagunaan Zakat pada Program Kesehatan Baznas Kota Bogor)". *Skripsi*, 12-19.
- Johari, F., Azis, M. R., & Ali, A. F. (2014). "The role of zakat in reducing poverty and income inequality among new convert (muallaf) in Selangor, Malaysia". *Online Journal Research in Islamic Studies Vol. 1 No. 3* , 43-56.
- Munir, M., & Djalaluddin, A. (2006). *Doktrin Reformasi Ekonomi dalam Al Quran*. Malang: UIN Maliki Press.
- Murniati, R. (2014). "Peran Zakat dalam Pembangunan Manusia (Kasus Program Pendayagunaan Zakat BAZ Kota Bogor)". *Skripsi* , 15-28.
- Nurzaman, M. (2010). "Zakat dan Human Development : An Empirical Analysis on Poverti Allevation in Jakarta, Indonesia".
- Rarasati, I. (2017). "Analisis Pengaruh Zakat Pertanian terhadap Ketimpangan pada Distribusi Pendapatan dan Pengentasan Kemiskinan". *Skripsi* , 41-83.
- Rozalinda. (2014). *Ekonomi Islam : Teori dan Aplikasinya pada Aktivitas Ekonomi*. Depok: RajaGrafindo Persada.
- Todaro, M. P., & Smith, S. C. (2011). *Pembangunan Ekonomi*. Jakarta: Erlangga.

Tsani, T. (2010). “Analisis Dampak Distribusi Zakat Terhadap Tingkat Kemiskinan dan Kesenjangan Pendapatan (Studi Kasus Pendayagunaan Zakat oleh Bazda Lampung Selatan”. *Skripsi* , 28-90.

Website

Bank, W. (2016). *www.worldbank.org*. Dipetik Juli Minggu, 8, dari [www.worldbank.org:https://openknowledge.worldbank.org/bitstream/handle/10986/25078/9781464809583.pdf](https://openknowledge.worldbank.org/bitstream/handle/10986/25078/9781464809583.pdf)

Baznas, P. (2017). *www.puskasbaznas.com*. Dipetik Maret Senin, 2018, dari <http://www.puskasbaznas.com/publications/books/623-dampak-zakat-terhadap-kesejahteraan-mustahik-di-indonesia-evaluasi-program-zakat-produktif-baznas>

Kemenkeu. (2017). *Kemenkeu.go.id*. Dipetik Juli Senin, Senin, dari [Kemenkeu.go.id:https://www.kemenkeu.go.id/media/4966/media-keuangan-edisi-april-2017-upload-6.pdf](https://www.kemenkeu.go.id/media/4966/media-keuangan-edisi-april-2017-upload-6.pdf)

WHO. (2018). *www.who.int*. Dipetik Juli 5, 2018, dari <http://apps.who.int/gho/data/view.main.60750?lang=en>

SKIRPSI

**ANALISIS PENGARUH PENDISTRIBUSIAN ZAKAT PRODUKTIF
TERHADAP TINGKAT KESEJAJARAN PENDAPATAN DAN
KESEJAHTERAAN MUSTAHIK**

Studi Kasus : Mustahik Baznas Kota Yogyakarta

**THE EFFECT OF PRODUCTIVE ZAKAT DISTRIBUTION ON
WELFARE AND INCOME INEQUALITY**

A Case Study : Mustahiq of Baznas in Yogyakarta

Diajukan oleh

**MITHA RAIHANA
20140430044**

Skripsi ini telah Dipertahankan dan Disahkan di depan Dewan Penguji Program
Studi Ilmu Ekonomi Fakultas Ekonomi dan Bisnis
Universitas Muhammadiyah Yogyakarta
Tanggal 11 Agustus 2018

Yang terdiri dari

Dr. Nano Prawoto, S.E., M.Si
Ketua Tim Penguji

Imamuddin Yuliadi, Dr., SE., M.Si
Anggota Tim Penguji

Susilo Nur Aji C.D., SE., MRDM
Anggota Tim Penguji

Mengetahui
Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis
Universitas Muhammadiyah Yogyakarta

Rizal Yaya, S.E., M.Sc., Ph.D., Ak., CA
NIK : 19731218199904 143 068